

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas menuju kawasan wisata Pantai Labuang Baruak di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya memadai, khususnya dari segi kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan sarana transportasi, serta fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata Pantai Labuang Baruak sebagai salah satu destinasi unggulan daerah. Peran Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata Pantai Labuang Baruak telah dilaksanakan melalui perencanaan program pengembangan pariwisata, pembinaan kelompok sadar wisata, serta upaya koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta belum terintegrasinya pembangunan aksesibilitas dengan kebijakan infrastruktur daerah secara menyeluruh.

Ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah*, peran Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan aksesibilitas kawasan wisata Pantai Labuang Baruak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*al-maslahah*), transparansi (*as-syufufiyyah*), dan akuntabilitas (*al-muhasabah*). Hal ini terlihat dari belum meratanya manfaat pembangunan aksesibilitas bagi masyarakat sekitar, keterbatasan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran, serta belum optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah agar pengelolaan aksesibilitas kawasan wisata benar-benar

berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dapat memperkuat perannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan mempercepat pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju Pantai Labuang Baruak, penyediaan sarana transportasi, serta fasilitas umum pendukung demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam pengelolaan anggaran pariwisata, pemerintah daerah perlu lebih konsisten menerapkan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*, khususnya keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*al-maslahah*), transparansi (*as-syufufiyyah*), dan akuntabilitas (*al-muhasabah*), antara lain dengan membuka akses informasi publik terkait perencanaan dan alokasi anggaran serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal perlu ditingkatkan tidak hanya melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tetapi juga dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam pengelolaan homestay, kuliner lokal, dan jasa transportasi menuju kawasan wisata sebagai upaya pemerataan manfaat ekonomi. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efektivitas pembangunan, Dinas Pariwisata juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta pihak swasta agar pembangunan aksesibilitas berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Di samping itu, strategi promosi wisata Pantai Labuang Baruak hendaknya tidak hanya menonjolkan daya tarik alam, tetapi juga berbasis aksesibilitas dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh wisatawan, seperti peta digital, informasi jalur wisata, dan sarana transportasi, sehingga dapat meningkatkan minat kunjungan dan mendukung terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Abidin, J., Darmawan, R., & Aisyianita, R. A. (2020). Pariwisata Ramah Disabilitas Di Wilayah Jakarta. *Bogor Hospitality Journal*, 4(2).
- Akbar, D. R. I., & Rosidin, R. (2024). ANALISIS PERAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BENGKULU. *JURNAL MANAJEMEN MODAL INSANI DAN BISNIS (JMMIB)*, 5(1), 86-105.
- Alamsyah, M. (2010). *Pemekaran Pemerintahan Nagari:: Studi Tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari Lunang Kabupaten Pesisir Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dilbarkhon, R. (2021). The role of the social environment in the formation of personality. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1493-1497.
- Darmawati, C. S. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 379-380.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fitria, M. N., Caspari, A., & Setiawan, A. (2024). Optimizing Government Policies To Support Sustainable Sharia-Based Tourism. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(2), 228-248.
- Fitria, M. N., Caspari, A., & Setiawan, A. (2024). Optimizing Government Policies To Support Sustainable Sharia-Based Tourism. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4(2), 228-248.
- Fredynasari Hidayat, A. D. (2023). Pengaruh Fasilitas Infrastruktur Jalan Raya Di Desa Sumber Rejeki Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. 4(1). <https://doi.org/10.57084/bej.v4i1.1040>
- Hisyam, M. A. (2024). Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. *Journal Of Islamic Economic And Law (Jiel)*, 1(1), 63-73
- Hemafitria, H., Sopia, K., & Octavia, E. (2022). Peran kepala desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 95-110.

- Hidin, M., & Jabar, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan. *Rechtenstudent*, 1(2), 140-153.
- Herdiana, D., & Widharetno, M. S. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 1(3), 122-134.
- Hisyam, M. A. (2024). Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Economic And Law (Jiel)*, 1(1), 63-73.
- Hisyam, M. A. (2024). Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Economic And Law (Jiel)*, 1(1), 63-73.
- Iwarsson, S., & Ståhl, A. (2003). Accessibility, usability and universal design—positioning and definition of concepts describing person-environment relationships. *Disability and rehabilitation*, 25(2), 57-66.
- Junaenah, I. (2022). Melokalkan hak asasi manusia melalui kepariwisataan inklusif: Landasan pembaharuan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan kepariwisataan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 320-335.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. 6(1), 56-70.
- Mustanir Ahmad, S. I. P., Amane, A. P. O., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S., AP, M., ... & Lopulalan, D. L. (2023). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Widina.
- Natalia, C. Y., Karini, N. M. O., & Mahadewi, N. P. E. (2020). Pengaruh aksesibilitas dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan ke Broken Beach dan Angel's Billabong. *Jurnal Ipta P-Issn*, 8(1), 2020.
- Oki, K. K., SE, M., & Sirilius Seran, S. E. (2025). *TRANSFORMASI OTONOMI DAERAH*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Patiroi, A. (2022). Kajian Aspek Keselamatan Jalan Terhadap Jalan Daerah Kabupaten Tana Toraja Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi Dan Pariwisata. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 9(1), 40-51.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Pranando, Y. H., & Fitri, A. (2023). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*

(JIHHP), 3(3).

- Pravita, V. D., Sembada, A. D., Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2023). FULFILMENT OF DISABILITY RIGHTS IN TOURISM POLICY. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 17(3), 204-219.
- Putri, D., & Taufik, D. N. (2024). Development of Disabled-Friendly Tourism Infrastructure: Providing Accessibility for All Tourists. *SocioVoyage: International Journal of Social Dynamics in Tourism*, 1(3), 26-35.
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 157-176.
- Ryaas, R. (2000). Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. *Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya*.
- Ristiyanto, H. G. (2020). Analisis Dampak Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blora. *Jurnal Simetris*, 14(1), 10-15.
- Riyadi, Eddy & Bratakusumah, Didin S. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom. *Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia*
- Rahmafritia, F., Sukmayadi, V., & Purboyo, H. (2020, May). The real and actual tourism accessibility in protected areas. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 501, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.
- Siregar, R. H. (2009). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(2), 06-06.
- Sobari, A. (2023). Menguji Asas-Asan Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik di PTUN. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 92-99.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, S. D., Simanjorang, E. F. S., & Siregar, N. A. (2022). Upaya Pengembangan Pantai Alam Geger sebagai Objek Wisata dalam Meningkatkan Tourism Visit dan Economic Sector bagi Masyarakat Desa Kampung dalam Kabupaten Labuhan Batu. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 134-147.
- Siletty, K. (2022). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaan Wisata Pantai*.
- Trijaya Novia, R., Prianto, E., & Purnomo, V. dwi. (2023). *Views of Sociology of Law Regarding Community Social Control*.
- Yumna, L., Alfari, U., Hidayat, A., Maerasoh, S., & Putra, R. H. (2025). ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF PRINSIP MAQASHID SYARIAH: STUDI ATAS UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam,
Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 4(2), 78-89.



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG